

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Cara mengetahui tentang sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan desa cerdas “*smart village*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) Tahun 2022, dibutuhkan sebuah teori-teori yang harus sesuai dengan judul penelitian agar dapat membantu peneliti dalam merumuskan suatu kajian masalah terkait bagaimana sistem politik pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan desa cerdas “*smart village*” melalui Bank sampah Tunas Bringin (BSTB) Tahun 2022.

##### 1. Sistem Politik

Secara *etimologis*, berawal dari tiga kata yaitu sistem, politik, dan indonesia yang menjadikan istilah sistem politik Indonesia. dimana kata “*systema*” memiliki makna merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari sekian banyak bagian yang tersusun. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, dan bagian tersebut dari hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen tersebut secara teratur.<sup>1</sup> Berdasarkan dari hal tersebut, kata “*systema*” ini berarti mempunyai arti sekumpulan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, serta integral, dan merupakan bagian dari satu keseluruhan (*a whole*). Dimana dalam pertumbuhannya, kata sistem tersebut mengalami penyimpangan sehingga memiliki banyak makna, dan makna tersebut tergantung objeknya dan lingkup pembahasannya. tetapi di setiap deskripsi menyampaikan konsep kumpulan objek atau komponen yang saling berhubungan secara struktural dan berinteraksi satu sama lain berdasarkan karakteristik tertentu.

arti dari sistem politik dapat dimengerti melalui secara menerangkan atau mendeskripsikan pada setiap kata yang membentuk istilah dari sebuah sistem politik, sehingga sejauh mungkin dapat diterima oleh umum. Sistem pun juga dapat dimaknai sebagai bagian dari sebuah penggabungan yang dibentuk dari beberapa bagian atau komponen, dan tingkat interpretasi sistem yang lebih tinggi daripada cara, proses, rencana, skema, prosedur, atau teknik juga dimungkinkan. Dimana konsisten dan

---

<sup>1</sup> Yoyoh Rohaniah and Efriza, *Handbook Sistem Politik Indonesia Menjelajahi Teori & Praktik*, ed. Yoyoh Rohaniah and Efriza, Pertama (Malang: Intrans Publishing, 2017).

berpola, serta sering bersifat otomatis adalah cara sistem dalam mekanismenya.<sup>2</sup>

Easton juga telah mendefinisikan bahwasanya istilah politik adalah cara untuk memutuskan apa yang penting di dalam masyarakat secara *otoritatif* dalam membuat keputusan akhir. Jadi, gagasan politik menurut Easton yaitu terkait dengan cara kerja pemerintah yang langsung terhubung pada negara.<sup>3</sup> Sebab itulah sangat bisa untuk disimpulkan bahwasanya jika makna sistem dan makna politik ini dijadikan sebuah definisi sebuah dasar ilmu yang di dalamnya terdapat beberapa komponen-komponen tentang tehnik, taktik, serta cara yang dapat diolah dan dapat dikerjakan oleh politisi guna memperoleh sistem kekuasaan dan tujuan awal dengan membuat pertahanan dan melakukan sebuah berbagai perumusan dan pelaksanaan pada keputusan politik yang dapat dilihat berdasarkan yang sudah diinginkan.

Hadirnya sebuah sistem politik nantinya juga akan membuat yang namanya perubahan, maka dari itu yang harus dilakukan yaitu harus bisa mengenal dan harus dapat mengetahui langkah-langkah sistem politik yang tepat agar nantinya bisa mewujudkan apa yang sudah diinginkan. Didalam analisis sistem politik menurut David Easton, Easton telah mengemukakan bahwa sistem politik adalah sistem interaksi dalam setiap masyarakat yang didalamnya dibuat alokasi guna mengikat atau bersifat *otoritatif* untuk diimplementasikan. David Easton juga memandang bahwasanya kehidupan politik bisa dikatakan sebagai suatu sistem yang terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan.

Aktivitas itu nantinya menemukan hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas itu sangatlah mempengaruhi bagaimana keputusan *otoritatif* yang dirumuskan dan dilaksanakan. Dimana beberapa masukan-masukan (*input*) yang datang dari komponen lain dalam sistem, merupakan energi bagi sistem itu sendiri yang menyebabkan sistem itu berjalan. Lalu masukan itu dikonversi oleh proses sistem politik sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang *otoritatif*.

Munculnya kebijakan-kebijakan itu nantinya mempunyai konsekuensi terhadap sistem politik itu sendiri maupun terhadap masyarakat lingkungannya. Hal itu telah ada pada gambaran

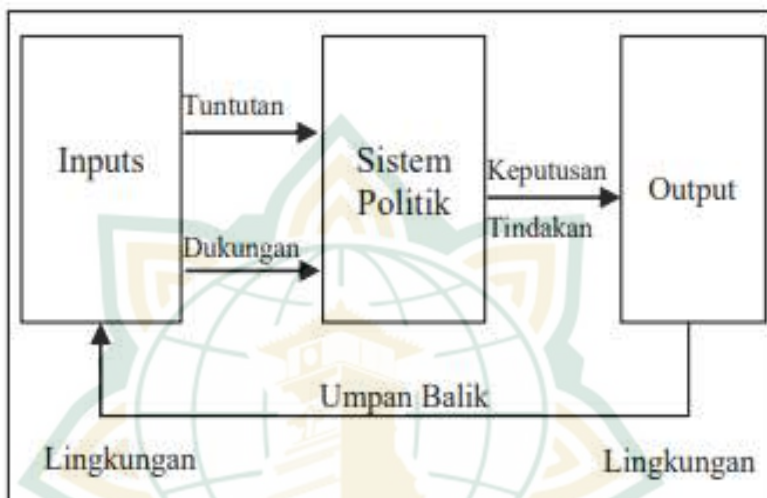
---

<sup>2</sup> Sahya Anggara, 'Buku Sistem Politik Indonesia.Pdf', Sistem Politik Indonesia, 2015, pp. 22–24.

<sup>3</sup> Mirza Shahreza, "Sistem Politik Dan Proses Komunikasi Politik," *ResearchGate*, no. March (2018): 1–34.

kehidupan politik melalui pendekatan sistem oleh David Easton dalam gambar sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Gambar 2.1 Konsep Alur Sistem Politik Menurut David Easton**



**Sumber : David Easton**

Gambar 2.1 tersebut telah menunjukkan bahwasanya unsur sistem politik yang telah digambar diatas secara umum terdiri ada beberapa komponen seperti (*input, proses, output, feedback* dari masyarakat dan lingkungan). Gambar tersebut menjelaskan bila kita berpegang pada anggapan bahwa sistem tingkah laku politik merupakan suatu unit tersendiri, maka akan terlihat bahwa yang menjamin terus berkerjanya sistem itu adalah berbagai macam *input*. Dimana *input-input* ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem itu menjadi *output* dan selanjutnya *output-output* ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem itu berada.

Rumusan ini sangatlah sederhana, tetapi juga cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal: mengenai *input-sistem* atau proses politik-*output*. Hubungan ini secara diagram dapat dilihat dalam gambar diatas, pada gambaran tersebut diagram merupakan suatu “model”, suatu istilah yang gagah, yang sangat sederhana yang bisa dipakai sebagai pendekatan dalam

<sup>4</sup> Magriasti Lince, “Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah : Analisis Dengan Teori Sistem David,” 2021.

mempelajari kehidupan politik.<sup>5</sup> yang mana semua itu lebih dijelaskan dibawah ini :

a) Input

*Input* sendiri pada analisis sistem politik David Easton berbentuk seperti sebuah siklus. Pada siklus tersebut, terdapat (*input*) berupa pengaruh dari lingkungan baik itu lingkungan *intrasocietal* maupun lingkungan *extrasocietal*, yang berupa tuntutan (*demands*) atau dukungan (*support*). Kemudian (*input*) tersebut dikonversi menjadi (*output*) berupa otoritas ataupun kebijaksanaan dari pemerintah. Lalu kemudian (*output*) tersebut berpengaruh maupun dipengaruhi oleh lingkungan sistem lainnya, kemudian pengaruh tersebut dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dan akan menjadi (*input*) baru yang akan diproses kembali.<sup>6</sup>

b) Output

Tuntutan yang telah dipilih dalam melalui suatu proses merupakan istilah *output* itu sendiri, dan hasilnya dapat berupa keputusan, tindakan, atau kebijakan tertentu (*output*). Dan pastinya akan ada yang namanya pembaharuan dukungan (*renewed support*) jika hasilnya seperti yang diharapkan. Namun, erosi dukungan akan terjadi jika keluaran atau *output* tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang mana pada akhirnya akan mengancam yang namanya stabilitas sistem. Melalui umpan balik, pihak yang terlibat dalam sistem politik dapat belajar tentang kebijakan yang dihasilkan pada *output*, dimana *Output* harus diinformasikan agar memperoleh tanggapan.

c) Lingkungan

Dalam pengertian ini, lingkungan sendiri merupakan bagian dari sistem politik yang bukan mengacu pada semua sistem sosial dan fisik, dimana lingkungan sendiri terbagi menjadi dua, yang bisa disebut dengan istilah *intrasocietal* dan *extrasocietal*. pengertian dari *intrasocietal* sendiri adalah bagian dari sistem politik yang melingkupi dari sikap, kepribadian, seperangkat tingkah laku, budaya maupun struktur sosial, serta gagasan baik dari lingkungan ekonomi yang mana dalam hal ini *intrasocietal* sebagai segmen bagi fungsional masyarakat. sedangkan pengertian yang *extrasocietal* adalah bagian dari

---

<sup>5</sup> Colin MacAndrews Mohtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, ed. Colin MacAndrews Mohtar Mas'ood, 15th ed. (Yogyakarta: Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2000).

<sup>6</sup> Ubedilah Badrun, *Sistem Politik Indonesia*, ed. Suryani, 3rd ed. (Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

komponen fungsional sebuah suprasistem atau masyarakat internasional yang melingkupi semua sistem di luar dari sistem politik. seperti krisis ekonomi, terkadang dapat berbentuk tekanan (*disturbance*) pada lingkungan terhadap sistem politik. ketika sistem politik harus menggunakan komponen utamanya untuk melawan tekanan dan masalah yang ada.<sup>7</sup>

Dari gambar serta pembahasan diatas bahwasanya bisa dikatakan teori dan konsep yang diterapkan pada sistem politik ini, nantinya dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis bagaimana sistem politik yang dilakukan pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan desa cerdas *Smart Village* melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) tahun 2022.

## 2. Pemerintahan yang Cerdas (*Good governance*)

Penyelenggaraan yang baik adalah definisi jika mendengar dari istilah dari "*Good governance*" atau bisa disebut pemerintahan yang cerdas. Namun, bagaimana penerapannya masih belum terbayangkan. Secara umum penyelenggaraan secara baik yang dimaksud tersebut ialah terkait isu *transparansi*, *akuntabilitas public* dan sebagainya. Padahal untuk mewujudkan dari sebuah pemahaman "*good governance*" atau pemerintahan yang cerdas itu tidaklah hanya sekedar memperjuangkan yang namanya *transparansi* dan *akuntabilitas* pada level tertentu, tapi sebenarnya amatlah pelik dan juga kompleks.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), istilah pemerintahan "*Governance*" yaitu menunjukkan prosedur yang menempatkan rakyat dalam posisi untuk mengatur yang namanya institusi, ekonomi, sistem sosial, dan sumber daya politik mereka. dimana hal tersebut digunakan tidak hanya untuk pertumbuhan tetapi juga untuk memupuk persatuan, mengintegrasikan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sementara itu definisi pemerintahan yang baik "*Good governance*" menurut *Word Bank* ialah suatu implementasi manajemen pembangunan yang sehat dan *akuntabel* yang menganut pada prinsip demokrasi dan pasar yang berfungsi, menghindari kemungkinan salah alokasi sumber daya dan investasi yang tidak efisien, mencegah korupsi baik dalam politik maupun administrasi, serta menegakkan pengendalian anggaran, dan

---

<sup>7</sup> Toto Pribadi, Ali Muhyidin, and Susanti, "Pendekatan Analisis Sistem Politik," *Sistem Politik Indonesia*, 2017, 1–39.

membangun kerangka hukum dan politik untuk memperluas aktivitas usaha.<sup>8</sup>

Membahas mengenai pemerintahan yang cerdas “*Good governance*” tentunya pasti memiliki banyak perbedaan pendapat terkait definisi. Pratikno sudah menjelaskan istilah “*governance*” dan “*government*” merupakan dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pemerintahan. Jika “*government*” merujuk pada pelaku yaitu pemerintah, maka “*governance*” digunakan untuk menyebut pada prosesnya. Secara sederhananya Pratikno menjelaskan bahwasanya “*governance*” ialah praktik atau implemementasi dari kerja aktor yaitu “*government*”.

Istilah pemerintahan “*governance*” kemudian ditambahkan dengan awalan yang normatif oleh para pemikir yaitu “*good*” yang mengindikasikan minimnya kelalaian dan meningkatnya kriteria untuk pemerintah yang baik sehingga memaksakan agenda pada pemerintah yang sebenarnya sudah kelebihan beban (*overload*). Pemerintah juga harus bertindak sesuai dengan kriteria “*good governance*” seperti menjamin aturan hukum, *akuntabilitas*, *stabilitas* politik, tidak adanya kekerasan, *efektivitas*, kualitas peraturan, dan pengendalian korupsi (dibuat oleh Bank dunia).<sup>9</sup>

Sesungguhnya istilah *governance* itu lebih tepat diterjemahkan sebagai tata kelola. Namun harus diakui bahwa istilah “*good governance*” ini dalam pemakaiannya oleh para pengkaji lebih banyak digunakan dalam pembicaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini juga disebabkan oleh karena diskusi tentang peran institusi dalam pembangunan didominasi oleh analisis mengenai peran negara.

Konsep tata kelola pemerintahan “*Good governance*” merupakan perluasan dari konsep pemerintah “*government*” karena didalam yang pertama, yaitu “*governance*”, terkandung pengertian bahwa gagasan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dipegang oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh orang-orang di luar pemerintahan seperti masyarakat umum sebagai “*stakeholders*”.

Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pemerintah sendiri dirasakan tidak memadai, mengingat kompleksitas kehidupan masyarakat yang menuntut adanya perubahan praktik pemerintahan dari yang semula didominasi oleh

---

<sup>8</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, ed. Ambar Teguh Sulistiyani, Pertama (Yogyakarta: Gava Media Klitren Lor GK III/15 Yogyakarta, 2004).

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal Juliansyahzen, ‘*Asy-Syaari ’ Ah Kontemporer*’, 2018.

pemerintah menjadi sebuah tata pemerintahan yang membagi otoritas antara pemerintah dan masyarakat secara proporsional.

Para ahli juga telah mengakui bahwa sesungguhnya "tidak ada satu sistem pemerintahan yang optimal yang dapat dijadikan model universal bagi negara-negara berkembang. Namun, apa yang disebut sebagai "tata pemerintahan yang baik" setidaknya dapat dibedakan dengan beberapa ciri, seperti Partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, daya tanggap, dan visi strategis adalah standar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Suatu pengertian terkait "governance" telah termaktub dalam ayat Al-Qur'an pada Surat Al-Hajj yang berbunyi:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَفَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ أَلِيمٌ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kekuasaan mereka dimuka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'nif dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Q.S. Al-Hajj)<sup>10</sup>

istilah "Good governance" yang terdapat pada ayat diatas mempunyai konsep sebagai suatu system pengelolaan pembangunan negara dengan pemanfaatan otoritas kekuasaan yang mempunyai orientasi terhadap:

- 1) Symbol penegakan sholat yang mengajarkan pada penciptaan tingkat pengendalian kondisifitas masyarakat dalam pemenuhan aspek spiritual dan kerohanian.
- 2) Kegiatan pembayaran zakat yang merupakan proksi dari menciptakan praktik ekonomi yang memiliki kemakmuran dan kesejahteraan.
- 3) Terjaganya stabilitas politik serta terciptanya keamanan bagi masyarakat sebagaimana tindakan "amar ma'ruf nahi munkar".

Unsur *governance* yang terkandung dalam dari ayat tersebut dapat diringkas menjadi tiga aspek, yaitu: (1) *spiritual governance*, (2) *economic governance*, dan (3) *political governance*.<sup>11</sup> Kepemerintahan "governance" adalah proses pelaksanaan

<sup>10</sup> Cynthia Nanda Irawan, 'Surat Al-Hajj Ayat 40-59 Arab: Arti, Kandungan dan Keutamaan', IDN Times, 2022, p. 1 <<https://www.idntimes.com/life/inspiration/cynthia-nanda/surat-al-hajj-ayat-40-59-arab-arti-kandungan-dan-keutamaan>>.

<sup>11</sup> Tenaga Pengajar, Pada Stain, and Manado Jurusan, "Rahmawati Adalah Tenaga Pengajar Pada STAIN Manado Jurusan Syari'ah," n.d.

sebuah negara yang dikelola oleh pemerintah. Dalam arti sempit, pemerintahan “*governance*” tata kelola mengacu pada segala kegiatan, fungsi, tugas, kewajiban yang diambil oleh lembaga eksekutif untuk memajukan kepentingan negara. Pemerintahan “*governance*” dalam arti luas, pemerintahan mengacu pada semua tindakan terencana yang berasal dari kedaulatan dan kemerdekaan dan didasarkan pada negara, rakyat atau penduduk, dan wilayahnya untuk memajukan tujuan negara. Proses yang dilalui negara untuk mengatur penyelesaian segala konflik domestik dengan maksud membela dan memajukan kepentingan rakyatnya yang dikenal dengan pemerintahan (*al-siyasah*).<sup>12</sup>

Terkait pemerintahan “*governance*”, untuk dapat mewujudkan “*Good governance*” sangatlah perlu tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai. Dari nilai itulah dapat diturunkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, Nabi bersabda:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ

Artinya: *Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna (HR At-tirmidzi dan Ahmad).*<sup>13</sup>

Dari ayat diatas dapat diturunkan konsep efisiensi dalam penerapan kepentingan umum (bahkan kepentingan pribadi), dan dapat disimpulkan dari paragraf di atas efisiensi adalah kesesuaian hasil proses dengan apa yang telah ditentukan sambil memanfaatkan sumber terbaik yang tersedia.

Lalu selanjutnya Keadilan adalah prinsip fundamental lain dari hukum Islam. Banyak penegasan tentang keadilan yang dapat ditemukan dalam sumber-sumber Islam, misalnya dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya : *Berbuat adillah kamu. karena berbuat adil itu lebih dekat kepada taqwa.*<sup>14</sup> Dan dalam ayat lain dikatakan.

<sup>12</sup> Uup Gufron, “Concept of Good Governance in the View of Al-Ghazali Konsep Good Governance Dalam Pandangan,” n.d., 773–801.

<sup>13</sup> Muhammad Abduh MSc Tuasikal, “Meninggalkan Hal Yang Tidak Bermanfaat,” Rumaysho.com, 2012, <https://rumaysho.com/2322-meninggalkan-hal-yang-tidak-bermanfaat.html> “Di antara kebaikan islam seseorang, mengatakan bahwa hadits ini shahih).



وَأِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

Artinya : Dan apabila kamu memberi keputusan, hendaklah kamu memutuskan dengan adil.<sup>15</sup>

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Seluruh rakyat Indonesia saat ini sedang meneriakkan masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum. Ketika memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke sumber daya politik, ekonomi, dan administrasi diperlukan untuk pemerintahan yang berhasil. Pemimpin yang mengizinkan diskriminasi terhadap warganya dalam situasi ini tidak menjunjung tinggi dasar-dasar pemerintahan yang baik.

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik “*good governance*”, yang harus dilakukan yaitu memodifikasi cara negara beroperasi (*State*), memegang tanggung jawab pemerintah, dan mengembangkan pelaku yang kompeten di luar negara untuk berperan dalam mengembangkan sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu pun tujuan pembangunan yang dapat dicapai dengan sukses hanya dengan mengubah susunan dan pengoperasian organisasi negara dan pemerintah. Harus diingat bahwasanya pemerintahan yang baik “*good governance*” juga harus menembus tingkatan yang berbeda dari sistem politik. Membangun tata pemerintahan yang baik “*good governance*” adalah tugas sosial yang penting. Dimana upaya tersebut perlu diselesaikan secara bertahap. Untuk menghadapi realita yang ada, Indonesia harus beradaptasi dalam memahami konsep terhadap gagasan ini.<sup>16</sup>

### 3. Desa Cerdas (*Smart Village*)

Desa cerdas atau yang disebut dengan istilah “*Smart Village*” merupakan sebuah adaptasi konsep dari “*smart city*”. Kota pintar “*smart city*” merupakan sebuah konsep pengembangan kota dengan system integrasi teknologi informasi yang bertujuan dalam meningkatkan kualitas mutu masyarakat. pengembangan

<sup>14</sup> Wahyu Gilang Putranto, “Bacaan QS Al Maidah Ayat 8, Terjemahan Dan Kandungan: Tentang Keadilan dan Kesaksian,” *Tribun lifestyle*, 2022, <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2022/08/18/bacaan-qs-al-maidah-ayat-8-terjemahan-dan-kandungan-tentang-keadilan-dan-kesaksian>.

<sup>15</sup> Maisulah, “Surat Al Maidah Ayat 42 Lengkap Dengan Terjemah dan Tafsir,” *Berita Sampang.com*, 2022, <https://sampang.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-1984919394/surat-al-maidah-ayat-42-lengkap-dengan-terjemah-dan-tafsir>.

<sup>16</sup> Ahmad Habibi, ‘Good Governance Di Era Otonomi Daerah’, 2.1 (2010), 45–56.

konsep tersebut diawali dari Barcelona spayol dengan program “*smart city Barcelona*” pada tahun 2011. Berkiblat dari program tersebut, Director kementerian komunikasi dan informatika menciptakan model *smart city* pada tahun 2011 untuk kota/kabupaten di Indonesia. Terdapat 6 dimensi dari pengaplikasian program tersebut,<sup>17</sup> yakni: (*smart branding, smart governance, smart economy, smart environment, smart society, dan smart living*,).

Desa cerdas “*smart village*” sendiri adalah sebuah strategi yang dapat digambarkan secara luas karena menggabungkan peningkatan efisiensi operasional desa untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan memperluas ekonomi lokal.<sup>18</sup> Diketahui juga pengembangan “*smart village*” sama dengan “*smart city*”, namun pada “*smart village*” lebih berfokus mengutamakan pemerintahan desa sebagai sentral atau pusat teknologi informasi.

Demi mewujudkan yang namanya desa cerdas “*smart village*”, pemerintah Desa Bermi berinisiatif memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya, yaitu memanfaatkan kesadaran akan bahaya sampah di lingkungan Desa Bermi dengan melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB). karena Desa Bermi kini sedang berupaya untuk mewujudkan salah satu dimensi dari “*smart village*” yaitu dimensi ekonomi yang cerdas (*smart economy*). Salah satu merupakan bagian dari “*smart village*” yang banyak mempunyai beberapa dimensi, namun dimensi-dimensi yang lebih sesuai untuk mewujudkan “*smart village*” diantaranya adalah 1) pemerintahan yang cerdas (*smart governance*), 2) masyarakat cerdas (*smart community*), 3) ekonomi makmur (*smart economy*), dan 4) kesejahteraan lingkungan (*smart environment*).

Inovasi dalam Pemanfaatan teknologi informasi diperlukan sebagai upaya pemerintah atas perwujudan konsep “*smart village*” di desa Bermi. Pemanfaatan atas teknologi informasi tersebut berdampak pada pengembangan potensi desa dalam peningkatan kualitas hidup serta kemajuan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang efisien dengan daya saing tinggi. Pengembangan Konsep “*smart village*” yang terdapat di desa bermi membutuhkan perhatian lanjut. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya perkembangan teknologi yang berpotensi dalam peninggalan nilai luhur serta kearifan local yang tertanam di masyarakat.

---

<sup>17</sup> Saffana Assani, “E-Sampah Sebagai Salah Satu Wujud *Smart Village* ; Study Analisa dan Perancangan” 5, no. 3 (n.d.): 169–77.

<sup>18</sup> Desa Sei, Lembu Makmur, and Kabupaten Kampar, “Edukasi Teknologi Informasi dalam Konsep” 5, no. 3 (2022): 155–64.

pengaplikasian konsep “*smart village*” membutuhkan komitmen serta dukungan dari setiap elemen desa agar memperoleh nilai manfaat yang tinggi tanpa mengurangi budaya leluhur dan kearifan local yang dimilikinya.

Penerapan konsep “*smart village*” juga membutuhkan Beberapa perhatian lanjut pada tingkat potensi desa yang dapat dimanfaatkan. Desa Bermi merupakan desa dengan letak geografis pada dataran tinggi pegunungan. Sesuai dengan keadaan geografisnya, desa ini memiliki potensi dibidang kebersihan lingkungan serta adanta infrastruktur internet dengan jaringan yang sangat baik.<sup>19</sup> Oleh karena itu pemerintah Desa Bermi akan mewujudkan konsep “*smart village*” pada dimensi “*smart economy*” melalui Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB). Yang mana konsep “*smart village*” yang akan diwujudkan oleh pemerintah Desa Bermi yaitu melalui beberapa dimensi, diantaranya:

a) Pemerintahan yang cerdas (*smart governance*)

Definisi pemerintahan yang cerdas diartikan sebagai “*smart governance*” atau pemerintahan dengan asas yang baik “*good governance*”. Secara rinci sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sangat memperhatikan aturan serta nilai hukum, keadilan, demokrasi, transparansi, partisipasi, dan faktor-faktor lain yang dapat mendorong suatu ketertiban. Tujuan utama konsep governance adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pelayanan pemerintahan yang baik dan berkualitas.

b) Masyarakat yang pintar (*smart community*)

Definisi masyarakat yang pintar “*smart community*”, masyarakat yang cerdas adalah mereka yang mampu memupuk kreativitasnya dan mengubahnya menjadi modal sosial bagi pertumbuhan ekonominya. masyarakat yang pintar dengan kecerdasannya akan terlibat dalam proses demokrasi dan merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan umum atau kepentingan publik.<sup>20</sup>

c) Ekonomi yang pintar (*smart economy*)

Definisi ekonomi yang cerdas “*smart economy*” yaitu suatu cara pengelolaan perekonomian secara pintar atau cerdas,

---

<sup>19</sup> Berbasis Smart and Village Desa, “Penerapan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis *Smart Village* Desa Aikdewa,” n.d.

<sup>20</sup> Ikram Maulidin, “Smart Governance dalam Layanan Terpadu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar’ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

dengan tujuan membangun ekosistem perekonomian di beberapa sektor yang dapat menghadapi dan mengatasi kendala pada saat pergolakan yang memerlukan adaptasi cepat. Fenomena yang dikenal sebagai era disrupsi ekonomi ditandai dengan pergeseran masyarakat dari aktivitas ekonomi langsung ke aktivitas digital di dunia maya.

Dimana tujuan utama dari “*smart economy*” adalah untuk dapat membangun ekosistem yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan sektor ekonomi terbaik di daerah yang dapat beradaptasi dengan perubahan di era disrupsi. “*Smart economy*” ini Untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, mengambil strategi yang menitikberatkan pada tatanan industri yang sinergis dan kreatif, saling bergantung dan saling menguntungkan dalam hal promosi, produksi, bahkan transaksi keuangan, dan dalam lingkungan yang kondusif.<sup>21</sup>

Secara sederhana, “*smart economy*” dapat diartikan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang efektif, serta untuk menurunkan biaya operasional suatu bisnis yang ada sehingga dapat bertahan dalam persaingan bisnis modern yang sengit.

d) Lingkungan yang cerdas (*smart environment*)

Definisi lingkungan yang cerdas “*smart environment*” dalam konsep desa cerdas “*smart village*” sangat berkaitan erat dengan masyarakat dan lingkungannya. Menurut gagasan desa cerdas “*smart village*”, yang dihasilkan dari pendanaan untuk infrastruktur cerdas dan masyarakat cerdas, maka lingkungan cerdas “*smart environment*” dalam hal ini adalah kombinasi dari hal-hal tersebut yang terkait dengan filosofi lingkungan hidup. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat bertujuan untuk mendorong pelestarian, maka pengembangan lingkungan pedesaan menuju lingkungan yang seimbang, berkeimbangan, berkesinambungan dan berkelanjutan, merupakan keluaran yang dihasilkan dari sinergi antara masyarakat dan lingkungan dalam rangka pembangunan suatu desa pintar “*smart village*”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Edi Surya Negara, *Smart Government*, ed. Ria Andryani, Pertama (Palembang: Universitas Bina Darma Press (PPP-UBD Press) Palembang, 2021).

<sup>22</sup> Rusdiana Setyaningtyas, “Buku Rusdiana,” 2022.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

keberadaan penelitian terdahulu dalam penelitian ini berkaitan dengan tata Kelola serta analisis data yang dijalankan. peninjauan akan penelitian terdahulu sangat bermanfaat bagi kelangsungan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya penelitian terdahulu juga berperan sebagai kiblat dalam proses pemecahan berbagai masalah yang dikaji oleh peneliti. Dengan memperhatikan Batasan serta kelemahan dari peneliti terdahulu maka kualitas hasil penelitian ini akan terjaga dan dapat dimanfaatkan dengan menyeluruh. Berikut merupakan sepuluh Penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan “*smart village*”:

*Pertama*, Sosialisasi Pendirian “Bank Sampah” Bagi Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Perempuan di Margasari. Peneliti Kusuma Wardany, Reni Permata Sari, Erni Mariana Tahun 2022 pada Jurnal Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Terkait hasil penelitiannya, berfokus pada relevansi peran dari Bank Sampah yang bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan juga memunculkan dampak sosial yang positif dan timbul pada masyarakat margasari. Dimana metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan, yang mempunyai sifat penelitian berupa ceramah sosialisasi manfaat Bank Sampah dan kunjungan lapangan mengenai bagaimana sistem Bank Sampah tersebut terbentuk.<sup>23</sup>

*Kedua*, Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bank Sampah Desa Nijang), Peneliti Fitri Arifa, Fitriah Permata Cita, Abdul Hadi Ilman Tahun 2019 pada Jurnal Nusantara Journal of Economics. Hasil penelitiannya yaitu berupa pendirian Bank sampah di Desa Nijang yang dipelopori oleh Rizkianto selaku ketua karang taruna Desa di tahun 2017. Gagasan tersebut dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah di desa. Ide atas pengelolaan sampah yang baik timbul sejalan manfaat yang diperoleh. Output yang dihasilkan dari pengadaan bank sampah di desa nijang berhasil meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Taraf ekonomi desa berkembang seiring dengan pendapatan yang dihasilkan

---

<sup>23</sup> Kusuma Wardany, Reni Permata Sari, and Erni Mariana, “Sosialisasi Pendirian ‘Bank Sampah’ Bagi Peningkatan Pendapatan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Margasari,” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 364–72, <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.4348>.

dari proses bank sampah yang dijalankan..<sup>24</sup> Penelitian kuantitatif dengan menggunakan paradigma asosiatif menjadi metode penelitian yang dijalankan. Paradigma asosiatif digunakan guna mencari hubungan atau pengaruh antara satu atau lebih variabel. Berlokasi di Kabupaten Sumbawa penelitian ini menggunakan sumber data primer langsung dari lapangan dengan publikasi jurnal sebagai sumber data sekunder. Dengan metode pengumpulan data lewat dokumentasi, wawancara serta observasi, peneliti berhasil mengumpulkan 50 orang sebagai responden. Responden tersebut dihasilkan dengan rumus slovin dalam proses penentuan sampel yang selanjutnya dianalisis dengan regresi linier berganda. Metode analisis tersebut digunakan dalam penelitian ini dengan software stata 11 sebagai alat bantu penelitian.

Referensi *ketiga* yang digunakan berjudul “Peran Bank Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga di Desa Sait Buttu Kec. Pematang Sidamanik”. Penelitian tersebut dijalankan oleh Mutiah Khaira, Uswah Hasanah, Isra Hayati pada Tahun 2020 Jurnal Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan dampak dari baiknya pengadaan pengelolaan sampah yang berfokus dalam peningkatan kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan desa. Pembentukan Bank sampah khususnya di Desa Sait Buttu memiliki peran yang penting dalam mengurangi sampah rumah tangga yang ada di masyarakat. Pemenelitian tersebut dibantu dengan mitra usaha Bank Sampah Simpatik yang berada di Desa Sait Buttu Kec. Pematang Sidamanik.<sup>25</sup> Penelitian yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat ini menggunakan metode program pengabdian dalam pengaplikasiannya. Pengabdian tersebut berperan sebagai jembatan dalam mendalami program kinerja yang membutuhkan berbagai kelompok masyarakat. besarnya peningkatan kesadaran dan memantapkan niat dari seluruh masyarakat ditentukan oleh kebersamaan serta kekompakan dalam keberlangsungan program bank sampah yang dilakukan. Hasil akhir yang dihasilkan Pada program bank sampah simpatik ini memiliki

---

<sup>24</sup> Fitri Arifa, Fitriah Permata Cita, and Abdul Hadi Iman, “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah Di Kabupaten Sumbawa,” *Nusantara Journal of Economics* 1, no. 01 (2019): 14–27, <https://doi.org/10.37673/nje.v1i01.321>.

<sup>25</sup> Mutiara Khaira; Uswah Hanasah; Isra Hayati, “Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga Di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email : Mutiahhkhaira@umsu.Ac.Id,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 187–95, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/IHSAN/article/view/5332>.

kaitan yang besar pada nilai pendapatan masyarakat yang didorong dari lancarnya fungsi pengelolaan bank yang berjalan.

*Keempat*, Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah Tahun 2015 pada Indonesian Journal of Conservation. Penelitian yang dijalankan memiliki hasil yang signifikan terhadap peningkatan dampak social masyarakat terkait dengan perlakuan sampah. Dampak social seperti adanya kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, kesadaran akan pengelolaan sampah hingga kebiasaan untuk menabung menjadi hasil dari terbentuknya bank sampah berupa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya Bank sampah Kelompok Peduli Lingkungan Serasi di Kelurahan Sidomulyo. Tingginya kesadaran tersebut memiliki peran dalam kebersihan lingkungan masyarakat yang dapat tercipta dari perilaku seperti pembuangan sampah ke TPS. Baiknya tingkat kesadaran masyarakat tersebut juga tidak luput dari Beberapa pengadaan program edukasi yang mendorong keikutsertaan masyarakat terhadap program bank sampah yang dilakukan.<sup>26</sup> Banyak program yang dikembangkan jelas relevan dengan peraturan pemerintah negara Indonesia No. 81 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa mengolah dan memanfaatkan sampah itu harus menjadi langkah nyata dalam mengelola sampah. Metode analisis pada penelitian yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan guna pengolahan sumber baik dari data primer maupun data sekunder. Penggunaan analisis tersebut secara signifikan berpengaruh untuk menilai tingkat dampak sosial, ekonomi serta lingkungan pada masyarakat dari adanya program Bank sampah yang dilakukan. Kenaikan progress responden terkait pemahaman atas masalah penelitian dinilai dengan tingkat presentase kecenderungan yang terdapat dalam jawaban responden.

*Kelima*, Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). Peneliti Anih Sri Suryani Tahun 2014 pada Jurnal Aspirasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang dijalankan dalam program Bank Sampah Malang (BSM) seperti pemilahan sampah berdampak secara signifikan pada kenaikan aspek ekonomi masyarakat. kenaikan tersebut dapat secara langsung diakses dalam 5 program tabungan yang ditawarkan. Kelima program tersebut terdiri dari : 1. Tabungan regular atau tabungan *fleksible* sesuai Namanya, tabungan ini dapat diakses kapan aja dengan minimal kurun waktu

---

<sup>26</sup> Kikis Dinar Yuliesti, Suripin Suripin, and Sudarno Sudarno, "Strategi Pengembangan Pengelolaan Rantai Pasok Dalam Pengelolaan Sampah Plastik," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18, no. 1 (2020): 126–32, <https://doi.org/10.14710/jil.18.1.126-132>.

selama satu bulan, 2. Tabungan lebaran, tabungan ini bertujuan untuk menunjang masyarakat atas kebutuhan perayaan hari raya. Sesuai dengan tujuan yang ditawarkan, tabungan ini dapat diambil pada waktu menjelang lebaran setiap tahunnya, 3. Tabungan sekolah, merupakan tabungan yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan Pendidikan. Tabungan ini dapat diakses pada tahun ajaran baru dalam pemenuhan kebutuhan siswa, 4. Tabungan sembako, merupakan tabungan khusus yang output hasilnya berupa sembako sesuai dengan nilai tabungan yang dimiliki, 5. Tabungan lingkungan, tabungan ini bertujuan dalam perbaikan lingkungan desa. Askes yang diberikan dalam tabungan ini berupa prasarana seperti tong sampah, tanaman, komposter, gerobak, serta prasarana lain yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. 6.<sup>27</sup> Tabungan sosial, merupakan bentuk tabungan dengan visi kesejahteraan social. Tabungan ini disalurkan kepada panti asuhan, pondok pesantren, dan lembaga sosial lainnya yang dapat memberikan manfaat sesuai dengan permintaan nasabah. dengan adanya mekanisme tabungan ini tujuannya yakni menjadi suatu program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah, dan menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi peningkatan volume sampah yang semakin tidak terkendali. Disamping itu, Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) juga memiliki mekanisme sistem yang kurang lebih hampir sama dengan tujuan yang sama pula yakni untuk mengurangi peningkatan volume sampah yang semakin hari makin banyak di Desa Bermi. Jadi, dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adanya Bank Sampah beserta mekanisme-mekanisme yang ada mempunyai dampak yang sangat positif bagi pemerintah dan juga masyarakat. dan hal tersebut relevan dengan penelitian ini.

*Keenam*, Efektivitas Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Bali Bersih. Peneliti Ni Komang Erika Depi Permatasari, I Wayan Sugiartana, I Komang Trisna Eka Putra Tahun 2022 pada Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik. dalam penelitian tersebut terdapat pendapat dari penelitian Ulfah, Normelani, & Arisanty menyatakan bahwa Bank sampah adalah konsep alternatif yang sudah berkembang di desa-desa dalam menggandeng masyarakat untuk peduli dengan keberadaan sampah guna bisa terciptanya suatu lingkungan yang bersih. Yang nantinya bisa membuat tingkat kesehatan bagi masyarakat menjadi lebih baik

---

<sup>27</sup> Anih Sri Suryani, 'Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)', *Aspirasi* Vol. 5 No. 1, Juni 2014, 5. Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang) (2014), 71–84 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447/344>>.



lagi, dan pastinya juga adanya jalinan saling interaksi sosial yang baik diantara beberapa warga pastinya. Hal itu terbukti realitanya pada penelitian ini, yaitu pernyataan dari I Wayan Yuswara yang mengatakan bahwa: “Melihat perkembangan bank sampah Bali bersih hingga saat ini masih berjalan, program ini menurut saya efektif karna dapat membantu pengelolaan sampah anorganik di Desa Padang Sambian. Terbukti sungai-sungai di sekitar sudah mulai bersih dari sampah plastik. Jika kita lihat sebelum adanya Bank Sampah sungai-sungai dipenuhi sampah, sampah anorganik tidak terkelola dengan benar. Dan dampak yang dihasilkan dari adanya Bank Sampah ini sangat positif”.<sup>28</sup> Itulah mengapa pemerintah sekarang berinovasi dan menyarankan harus ada yang namanya Bank Sampah untuk mewujudkan tujuan positif tersebut. Terkait metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data primer yang didapat bersumber dari wawancara di lapangan sedangkan data sekunder bersumber pada buku-buku para ahli dan jurnal yang terkait.

Penelitian *Ketujuh* yang dijadikan referensi dasar adalah penelitian dari Makmur Selomo, Anwar Mallongi, Agus Bintara Birawida dan Muammar yang berjudul “Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Kota Makassar” pada tahun 2016. Hasil penelitian yang terbit pada jurnal MKMI tersebutnya berfokus pada aspek pendorong masyarakat dalam mengikuti serta turut berperan dalam operasional bank sampah Pelita Harapan di Kelurahan Ballaparang Kota Makassar. Desain “*cross sectional*” menjadi jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan metode survey analitik. Berlokasi di RW.04 Kelurahan Ballaparang Kota Makassar bulan oktober Tahun 2015 penelitian akan bank bank sampah Pelita Harapan ini dilaksanakan.<sup>29</sup> Terdapat total 200 rumah tangga hasil dari pengaplikasian systematic random yang menjadi sample peneliti. Metode wawancara didukung kuisioner digunakan dalam proses pengambilan data data penelitian ini. selanjutnya modifikasi atas penelitian furnada digunakan sebagai bahan ukur tingkat pengetahuan pada masyarakat desa. Selanjutnya Penelitian ini dilakukan baik dengan *univariat* maupun *bivariat* dengan pengujian uji *chi square* dan uji *phi* pada proses analisisnya. Proses tersebut diuji secara

---

<sup>28</sup> Ni Komang Erika Depi Permatasari, I Wayan Sugiartana, and I Komang Trisna Eka Putra, “Efektivitas Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Bali Bersih,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2022, 98–106, <https://doi.org/10.52318/jisip.2022.v36.2.4>.

<sup>29</sup> Makmur Selomo et al., “Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah Di Kota Makassar,” *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 12, no. 4 (2017): 232–40, <https://doi.org/10.30597/mkmi.v12i4.1543>.

sistematis dengan tampilan penyajian data dalam bentuk tabel serta narasi yang jelas.

*Kedelapan*, Strategi Pengembangan Bank Sampah di Wilayah Depok. Peneliti Linda Fitriana Hasnam, Rizal Syarief, dan Ahmad Mukhlis Yusuf Tahun 2017 pada Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen. Hasil penelitiannya berfokus pada tujuan untuk mengidentifikasi faktor *EFE* dan *IFE* Bank sampah agar dapat bertahan serta berkelanjutan (*sustainable*). Karena munculnya Bank Sampah membuka peluang usaha industri kreatif berbahan baku sampah yang diketahui masih sangat luas pasarnya karena belum banyak pihak yang berusaha dan fokus di industri ini sehingga sangat prospektif untuk ditekuni. Mengingat sampah adalah masalah global di semua negara termasuk Indonesia, sebab akumulasi sampah yang dihasilkan berbanding lurus dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 256 juta jiwa pada Tahun 2015.<sup>30</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan studi kasus di Bank Sampah WPL milik Bapak Baron Noorwendo dan Ibu Sriwulan. Deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode penelitian yang berasas kesejahteraan social ini. Data dari penelitian deskriptif kualitatif ini berbentuk kata-kata, catatan observasi serta dokumen atas pernyataan-pernyataan verbal hasil wawancara atau kuesioner yang bersifat *non angka*. Wawancara, penyebaran kuesioner serta *Forum Group Discussion (FGD)* kepada responden menjadi Sumber data primer yang selanjutnya diolah menggunakan Teknik *purposive sampling*. sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber internal lembaga *Bank Sampah WPL*, studi pustaka, media cetak, internet, jurnal, tesis dan informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

*Kesembilan*, Perwujudan dari Sistem Politik Intrakomunitas dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan: Studi Kasus Bank Sampah Gardu Action, Mancingan Xi, Parangtritis, Bantul. Peneliti Anggalih Bayu Muh. Kamim Tahun 2017 pada Jurnal Politica. Hasil penelitiannya berfokus pada munculnya Bank Sampah Gardu Action sebagai hasil dari sistem politik intrakomunitas menjadi solusi dari ancaman konflik dari keadaan *over capacity* TPS yang menimbulkan berbagai gangguan dari timbunan sampah. dan tak hanya itu dalam penelitian ini fokus lainnya yaitu Bank Sampah sudah menerapkan prosedur baru yaitu sistem daur ulang, dimana sistem daur ulang ini yang dimaksud ialah memanfaatkan sampah menjadi barang yang

---

<sup>30</sup> Linda Fitriana Hasnam, Rizal Syarief, and Ahmad Mukhlis Yusuf, "Strategy Development of Waste Banks in Depok Area," *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 3 (2017): 407–16.

mempunyai nilai ekonomis dan bermanfaat. sehingga kehadirannya bisa menjadikan bentuk dari sebuah saling kepedulian antara sesama komunitas dan tidak akan menimbulkan konflik justru bisa meredam konflik. Dimana kehadiran Bank Sampah Gardu Action telah menjelaskan bagaimana proses pengendalian konflik yang telah diterapkan dan dipasifkan oleh sistem politik intrakomunitas. Bank Sampah Gardu Action sendiri telah membantu memberikan sumber penghidupan baru bagi komunitas karena telah mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis yang menjadi sumber pendapatan baru bagi anggota komunitas.<sup>31</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana data atau informasi terkaktual seputar kegiatan dan berbagai konflik lingkungan serta upaya pengelolaan pariwisata di Mancingan XI, Parangtritis didapatkan melalui observasi lapangan dan wawancara intens dengan beberapa informan terkait. Pengambilan data dilakukan pada bulan september-oktober 2016 di Mancingan XI, Parangtritis, Bantul. Wawancara didapatkan dengan metode *snowball sampling*.

*Kesepuluh*, Adapun Dampak yang ditimbulkan Program Bank Sampah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Peneliti Mita Novianty. Hasil penelitiannya berfokus program Bank Sampah yang kini sudah berjalan, bahwasanya ada banyak manfaat yang dikeyam oleh masyarakat dengan melakukan menabung sampah. Masyarakat menabung sampah, artinya juga masyarakat juga mendapatkan manfaat berupa uang. penghasilan yang didapatkan dari menabung sampah di Bank Sampah, masyarakat kini dapat menjangkau pembiayaan pendidikan anak. Rata-rata masyarakat yang menabung sampah ini memiliki keluarga dan anak yang masih bersekolah. Adanya penghasilan yang didapatkan dari Bank Sampah, tentunya masyarakat dapat menunjang pembiayaan pendidikan anak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Observasi, pembagian kuisioner serta wawancara yang merupakan hasil atas penggabungan study lapangan dan kepustakaan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini.<sup>32</sup> pemaparan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif

---

<sup>31</sup> Anggalih Bayu Muh Kamim, "Perwujudan Sistem Politik Intrakomunitas Dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan," *Politica* 8, no. 1 (2017): 20–37, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/882/536>.

<sup>32</sup> Mita Novianty, 'Dampak Program Bank Sampah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan', 4.1 (2557), 88–100.

seperti koding, pemaparan klasifikasi data, serta perhitungan frekuensi masing-masing kategori merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan guna pemenuhan analisis data yang selanjutnya diuji secara sistematis.

Persamaan dari kesepuluh studi terdahulu diatas yaitu pembahasan terkait munculnya pengaplikasian Bank Sampah pada suatu wilayah dipicu dari manfaat yang ditawarkannya. Banyaknya aspek positif yang dihasilkan terutama dari segi kenaikan ekonomi membuat minat masyarakat (sesuai penelitian terdahulu) meningkat. Dalam praktiknya, penyelenggaraan bank sampah menghasilkan banyaknya mekanisme relasi serta penambahan jaringan social yang bersifat ekonomis. Tidak hanya pada aspek ekonomi, pembentukan bank sampah utamanya berdampak pada kebersihan lingkungan masyarakat. berkurangnya tumpukan sampah, bersihnya selokan, tersusunnya pembuangan sampah, menariknya pemandangan desa hingga terciptanya kemajuan desa merupakan dampak positif yang dihasilkan dari pengaplikasian program bank sampah disuatu desa. Dengan dampak internal (peningkatan ekonomi masyarakat) serta dampak eksternal (kebersihan lingkungan desa) yang ditawarkan diharapkan masyarakat dapat secara langsung mendorong operasional pelaksanaan dari adanya program bank sampah. meskipun keuntungan yang dihasilkan tidak secara langsung dapat dinikmati, namun setiap kecil proses yang dilakukan berdampak pada peringan beban masyarakat pada kebutuhan hariannya.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu kesepuluh diatas adalah terdapat pada fokus penelitian. Dimana pada penelitian ini, fokus penelitiannya berupa sistem pemerintah Desa Bermi dalam mewujudkan desa cerdas "*smart village*" melalui mendirikan yang namanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) bagi masyarakat Desa Bermi. Sedangkan penelitian terdahulu lebih terfokus terhadap peran dan dampak dari Bank Sampah yang sudah berjalan bagi masyarakat pada suatu wilayah. Adapun adanya perbedaan ini diharapkan akan menimbulkan hasil yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai fakta baru dan berbeda dengan penelitian lainnya. pertama, yaitu terkait kehadiran Bank Sampah. Mayoritas penelitian biasanya meneliti adanya munculnya Bank Sampah hanya sebagai objek pengelolaan sampah saja, tetapi untuk penelitian ini kehadiran Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yang ada di Desa Bermi sebagai perwujudan dari "*smart village*" dengan menerapkan dimensi-dimensinya, diantaranya yaitu *smart governance*, *smart community*, *smart economy*, dan *smart*

*environment*. Dimana belum pernah diteliti oleh siapapun, artinya penelitian ini memberikan gambaran serta pemahaman baru mengenai pentingnya hadirnya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) di masyarakat dengan menerapkan dimensi “*smart village*” itu sendiri. Kedua, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan beberapa metode antara lain; metode *survey*, dan kuantitatif. Jadi, dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam penelitian ini menjadi hal yang baru untuk diteliti.

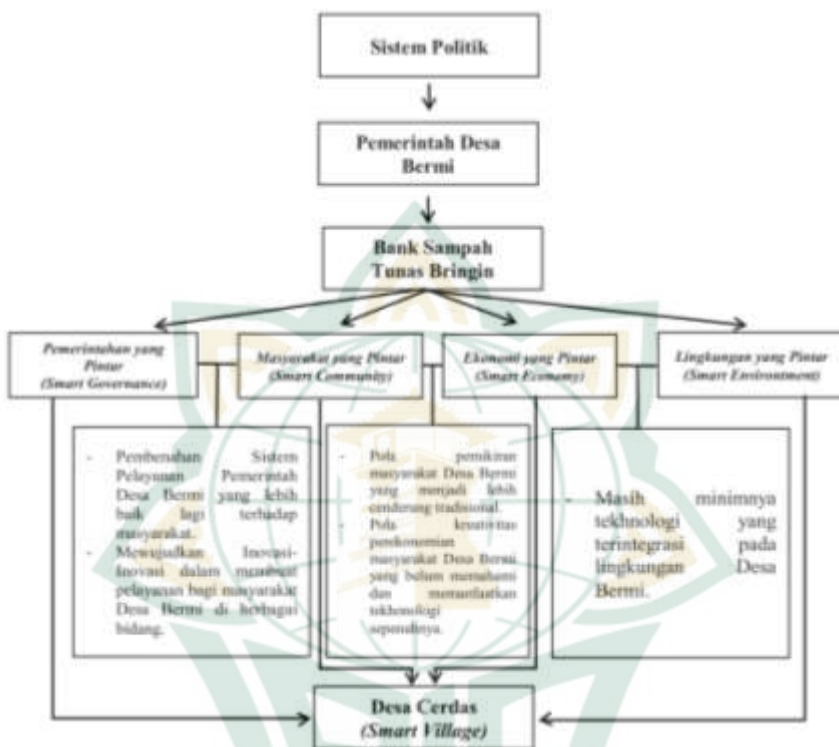
### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan alat yang bersifat sistematis dan terstruktur yang digunakan dalam meringankan seseorang memahami suatu masalah. Sejalan dengan pengertian tersebut, Sugiyono (2013) mendefinisikan kerangka berpikir sebagai model konseptual yang menjabarkan pentingnya sebuah masalah dilihat dari keterkaitan antara teori dengan faktor yang digunakan.<sup>33</sup> Adapun kerangka berpikir dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. Sugiyono (Bandung, 2013).

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



Gambar 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan pemerintah Desa Bermi yang menggunakan sistem politik guna ingin mewujudkan yang namanya desa cerdas “*smart village*” dengan melalui beberapa dimensi dalam komponen-komponen “*smart village*” itu sendiri. Diantaranya *pertama* ada pemerintahan Desa Bermi yang smart “*smart governance*” yang dimaksud pemerintahan yang smart yaitu pemerintahan Desa Bermi yang telah berinovasi untuk menjadi yang lebih baik lagi dan tetap selalu mengupgrade seiring berjalannya era tekhologi ini, sehingga nantinya bisa memberikan sistem pelayanan pemerintahan Desa Bermi yang baik dan berkualitas kepada masyarakat Desa Bermi. Lalu *kedua* yaitu masyarakat Desa Bermi yang smart “*smart community*”, yang dimaksud masyarakat yang smart adalah masyarakat Desa Bermi yang mampu mengembangkan kreativitasnya dan menjadikan kreativitas tersebut sebagai modal sosial dalam mengembangkan perekonomiannya dalam sehari-harinya. Dilanjutkan *ketiga* yaitu ekonomi yang pintar “*smart economy*”, ekonomi pintar yang

dimaksud dalam tabel diatas yaitu sebuah tata cara dalam mengelola bidang ekonomi dengan pintar atau cerdas, dimana tujuannya adalah untuk mewujudkan ekosistem di bidang ekonomi pada Desa Bermi itu sendiri. Dan terakhir adanya lingkungan yang smart “*smart environment*”, lingkungan yang smart yang dimaksud disini berdasarkan tabel diatas yaitu adanya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat Desa Bermi yang ditujukan untuk mendorong pelestarian lalu pengembangan lingkungan perdesaan (Desa Bermi) yang menuju berkeselimbangan, berkesinambungan dan juga berkelanjutan bagi masyarakat Desa Bermi nantinya.

Dari beberapa dimensi-dimensi yang telah diterangkan diatas maka pemerintahan Desa Bermi mempunyai sistem politik yang bermodalkan dari dimensi-dimensi tersebut yang nantinya bisa mewujudkan desa cerdas “*smart village*” dengan mendirikan yang namanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) yang berada di unit lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Bina Sejahtera Desa Bermi. Dimana tujuan dalam mendirikan Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB) tersebut, agar bisa membuat lingkungan Desa Bermi menjadi lebih bersih lagi, dan masyarakat Desa Bermi lebih mempunyai penghasilan tambahan dalam pemanfaatan adanya Bank Sampah Tunas Bringin (BSTB). walaupun penghasilannya tidak langsung banyak yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Bermi, tetapi itu bisa sangat terbantu dengan hasil yang diperoleh untuk kebutuhan sehari-hari dan juga pendidikan anak.